

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, Erani, Yustika. 2015. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jakarta Selatan: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI.
- Ali, Zainuddin. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Busrizalti, H.M. 2013. *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*. Yogyakarta: Total Media.
- Dimiyati, Khudzifah dan Kelik Wardiono. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Dr. Huda, Ni'matul. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press.
- Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny. 2020. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Encik, Muhammad, Fauzan. 2016. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Girling, John. *Corruption, Capitalism, and democracy*. 2002. London:Routledge Studies in Social and Political Thought.
- Hamzah, Halim dan Kemal, Redindo. 2009. *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Kaloh, J. 2007. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah: Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Marjoko, Saputra Iswan dan Hasibuan Hawari. 2013. *Pemerintahan Desa yang baik*. Medan: Bitra Indonesia, The Activator For Rural Progress.

- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- M. Iqbal Hasan. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Cet. I. Jakarta: Ghanlia Indonesia.
- Nazir, Mohammad. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta. 1998.
- Nogi, Hessel, S. 2003. *Analisis Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah Kontemporer*. Yogyakarta: Lukman Offset.
- Riawan, Tjandra, W. 2004. *Perspektif Otonomi Desa Dalam Dinamika Desentralisasi*. Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri.
- Ridwan HR. 2009. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rozali, Abdullah. 2010. *Pelaksanaan Otonomi Luas "Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sarman, Mohamad, Taufik, Makarao. 2011. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sjadzali Munawir. 1990. *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Semarang: University Indonesia Press.
- Soemantri, Trisantono, Bambang. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Bandung. Fokus Media.
- Suratman dan Philips Dillah. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Usman, Suparman, Itang. 2015. *Filsafat Hukum Islam*. Serang: Laksita Indonesia.
- Widjaja, A. W. 1993. *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Widjaja, HAW. 2004. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Cet. Ke-2 Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal

- Fajrin, Ahadi, P. 2016. "Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Pembentukan Desa Yang Partisipatif di Kabupaten Lampung Timur". *Jurnal Fiat Justisia*. 10(3). 413-432.
- Hendrik, Okta. 2013. "Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa Tanjung Keranjang Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 1(2). 459-469.
- Iswanto. 2020. "Peraturan Desa Dan Kedudukannya Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan". *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum*. 4(2). 70-77.
- Karinda, Kismau. 2018. "Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan". *Jurnal Sosio Sains*. 4(1). 74-86.
- Latifah, N.L.Z. 2016. "Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa (The Village Autonomy and The Effectiveness of Village Fund)". *Jurnal Penelitian Politik*. 13(2). 193-211.
- Nugraha, I Gusti Made Bayu, dkk. 2021. "Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Lembaga Pengawas Terhadap Kinerja Kepala Desa Di Dalam Pemerintahan Desa". *Jurnal Interpretasi Hukum*. 2(3). 584-589.
- Nuha, Septiawan; Henry juliani; Nabitatus Saadah. 2017. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Pada Desa Punjulharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. *Diponegoro Law journal*. 6(1) : 1-22.
- Putera, Astomo. 2018. "Kedudukan dan Pengujian Konstitusionalitas Peraturan Desa Dalam Peraturan Perundang-Undangan". *Jurnal Konstitusi*. 15(2). 283-305.

- Putri, LS. 2016. “Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa (Village Authority and The issuance of Village Regulation). *Jurnal Legislasi Indonesia*. 13(2). 161-176
- Ramli. 2020. “Tugas, Kewenangan, Hak dan Kewajiban Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi*. 2(2). 16-20.
- Rico, herawan. 2015. “Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia : Melihat Desa Dari Sudut Pandang Aturan Perundang-Undangan”. *Jurnal Desentralisasi Lembaga Administrasi Negara*. 13(1). 61-75.
- Samsu, La. 2017. “Al-Sulṭah Al-Tasyri’iyyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiziyyah, Al-Sulṭah Al-QaḍĀ’iyyah”. *Jurnal Tahkim*. 13(1). 156-171.
- Sholahudin, U, Wahyudi, MH, & Hariri, A. 2017. “Pemerintah Desa Pasca UU No. 6 Tahun 2014 (Studi Tentang Implementasi Otonomi Desa di Desa Paciran kabupaten Lamongan)”. *Jurnal Cakrawala*. 11(2). 145-155.
- Sugiman. 2018. “Pemerintahan Desa”. *Jurnal Binamulia Hukum*. 7(1). 82-95.
- Wiguna, YT, Dewi, R,& Angelia, N. 2017. “Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa”. *Jurnal Perspektif*. 6(2). 41-52.
- Yurikosari, Andari. 2011. “Perda DKI Tentang Bangunan Gedung: Kedudukan Hukum Peraturan Daerah Terhadap Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang”. *Jurnal Pamator*. 4(2). 113-117.
- Yusnidhar, Atrya, harun, Aidul Fitriadi, Azhari. 2021. “Legal Accountability of Recording Transparency in Village Fund Financial Reporting”. *Jurnal Jurisprudence*. 11(2). 267-281.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis

Peraturan Di Desa.

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan

Permusyawaratan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Daerah kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Badan

Permusyawaratan Desa.

Peraturan Desa Gedangan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Desa (RPJM DESA) Tahun 2019-2025.

Website

Pakpahan Rudy Hendra, SH, M.Hum, dkk. “Pengawasan Peraturan Daerah Dikaitkan

dengan Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak

Asasi Manusia”. [http://kumham-jakarta.info/download/cat_view/54-karya-](http://kumham-jakarta.info/download/cat_view/54-karya-ilmiah/61-birokrasi)

[ilmiah/61-birokrasi](http://kumham-jakarta.info/download/cat_view/54-karya-ilmiah/61-birokrasi). tanggal akses 15 Februari 2023, Pukul 19.30 WIB.

Rudi. “Pembentukan Peraturan Desa”. [http:// www.rechtboy.wordpress.com](http://www.rechtboy.wordpress.com). Tanggal akses

15 Februari 2023, Pukul 22.20 WIB.